

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)TAHUN 2021 - 2026
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, berhasil menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis periode tahun 2021 - 2026.

Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025. Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang diharapkan memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) menjadi acuan dalam menyusun perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan, selain itu Rencana Strategis (Renstra) juga sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sesuai tahun pelaksanaan anggaran berjalan.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan dan penyajian data dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak masih diperlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Bengkalis, November 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.2.1. Sumber Daya Manusia	14
2.2.2. Sarana dan Prasarana	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	26
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga	48
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5. Penentuan Isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	82
BAB VIII	PENUTUP	84
	8.1. Kesimpulan	84
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	85
	LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk : (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil

yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bengkalis serta pelaksanaan kegiatan sesuai wewenang dan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi: (1) Persiapan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksaaan Forum Perangkat Daerah, (5) Penyusunan Rancangan Akhir, dan (6) Penetapan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pendapatan daerah dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena melalui proyeksi kinerja urusan bidang kesatuan bangsa dan politik tersebut tertuang tantangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD disusun berdasarkan skala

prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;

I.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan gambaran rencana arah kebijakan, program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yang bersifat mendasar dengan berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 ini adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada pejabat/aparatur sipil negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis terkait dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan secara sinergis dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis, Provinsi dan Nasional.
2. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsinya.
3. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, guna meningkatkan komitmen kinerja dalam mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
4. Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal, antar dan lintas Perangkat Daerah dengan masyarakat.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 tersebut adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - II. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
 - II. 2 Sumber Daya PD
 - II. 3 Kinerja Pelayanan PD
 - II. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan PD
 - III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - III.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
 - III.4 Telaah KLHS
 - III. 5 Penentuan Isu Strategis

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sebagai Kepala Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Bengkalis, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

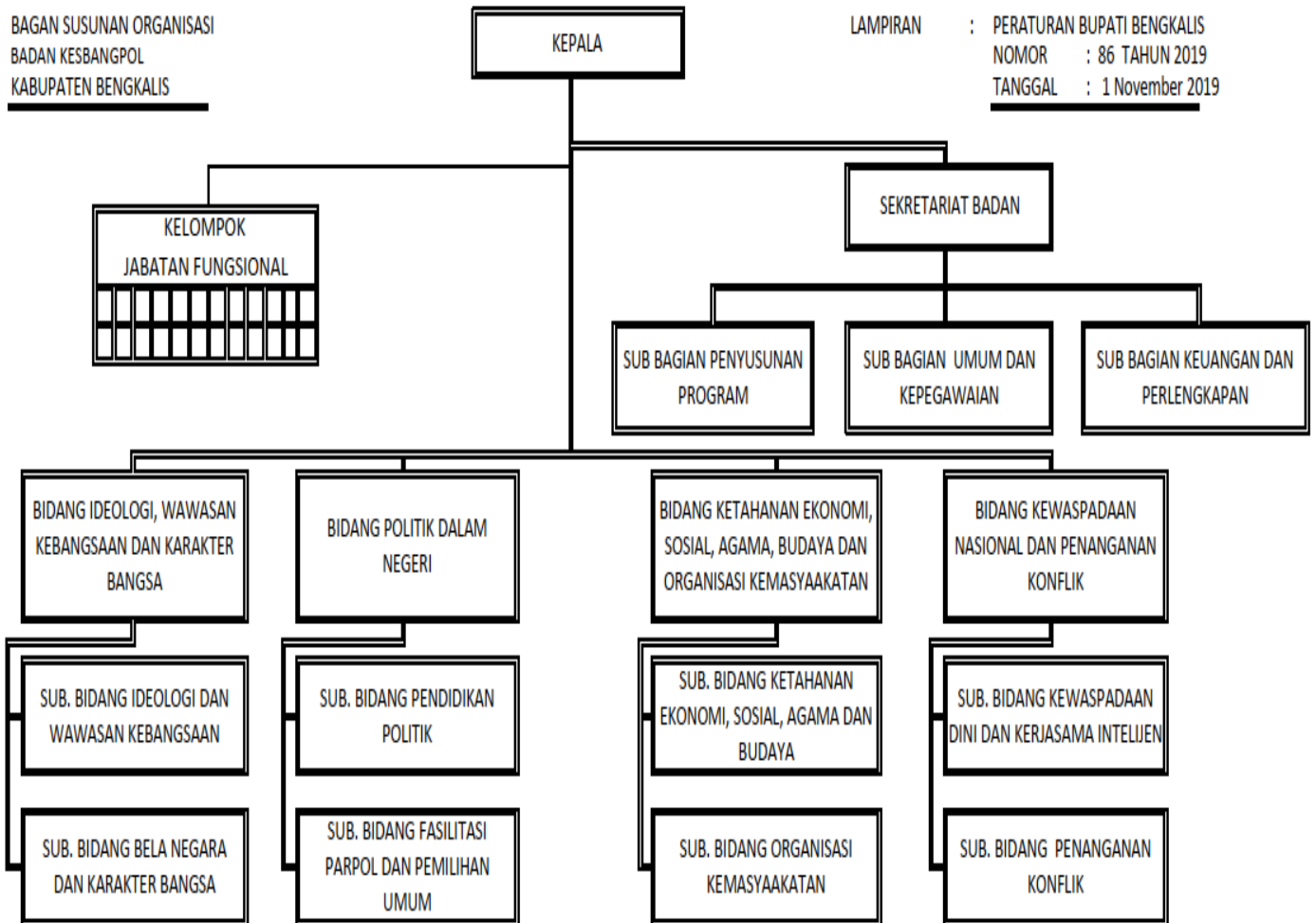
- 1). Kepala
- 2). Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- 3). Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
- 4). Bidang Politik, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik

- b. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Partai Politik dan Pemilihan Umum
- 5). Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat
- 6). Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik

**Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 86 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 November 2019



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sarana, prasarana dan peralatan kerja. Oleh karena itu skala prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam rangka pengembangan organisasi adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemenuhan saran, prasarana dan peralatan kerja untuk memperoleh dukungan sumber daya yang berkualitas serta sarana, prasarana dan peralatan kerja yang memadai.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis didukung oleh personil sebanyak 49 (Empat puluh Sembilan) orang yang terdiri dari PNS 30 (tiga puluh) orang, dan Tenaga Honorer sebanyak 19 (Sembilan belas) orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Badan Kesbangpol
Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Sekretariat	5	7	12
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	2	2	4
3.	Bidang Politik Dalam Negeri	3	3	6
4.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Masyarakat	3	1	4
5.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	4	0	4
TOTAL		17	13	30

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah 30 (tiga puluh) orang PNS dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis, 17 orang (17%) adalah laki-laki dan 13 orang (13%) adalah perempuan.

Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis belum merata, dari segi jumlah PNS yang hanya berjumlah 30 (tiga puluh) orang untuk melaksanakan pelayanan pada suatu Badan dan masih terdapat kesenjangan antara jumlah PNS laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Badan Kesbangpol
Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1.	Sekretariat	1	2	7	2
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	-	2	2
3.	Bidang Politik Dalam Negeri	-	-	6	-
4.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Masyarakat	-	1	2	1
5.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	-	3	1
TOTAL		1	3	20	6

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 20 orang atau 20%, sedangkan Golongan I sebanyak 2 orang atau 2%, Golongan II sebanyak 3 Orang atau 3% dan Golongan IV sebanyak 6 orang atau 6%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Badan Kesbangpol
Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	ESELON		
		II	III	IV
1.	Sekretariat	1	1	3
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	1	1
3.	Bidang Politik Dalam Negeri	-	1	2
4.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	2
5.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	1	1
TOTAL		1	5	9

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 15 jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Terdapat kekosongan untuk 2 (dua) jabatan di Eselon IV, karena pada tahun akhir 2020 terdapat 1 (satu) orang memasuki usia pensiun dan pada awal tahun terdapat 1 (satu) orang pejabat eselon IV juga memasuki usia pensiun.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Badan Kesbangpol
Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal
Yang Ditamatkan

No	Unit Kerja	JUMLAH			
		SLTP	SMU	S1	S2
1	Sekretariat	1	2	7	2
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	-	3	1
3	Bidang Politik Dalam Negeri	-	2	4	-
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	-	1	1	2
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	2	1	1
TOTAL		1	7	16	6

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 16 orang atau sebesar (16%) disusul kemudian pendidikan SMA sebanyak 7 orang (7%) dan Tingkat Pendidikan Magister (S2) sebanyak 6 orang (6%) dan dengan tingkat pendidikan SMP hanya 2 orang (2%). Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mengalami permasalahan pada jumlah atau kuantitas PNS, namun upaya peningkatan kualitas PNS untuk meningkatkan pendidikan formal maupun non formal guna meningkatkan kompetensi SDM di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.5
Komposisi PNS Badan Kesbangpol
Kabupaten Bengkalis Menurut Usia

NO	UNIT KERJA	USIA (TAHUN)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	3	2	3	4	12
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	-	-	-	-	-	1	3	4
3	Bidang Politik Dalam Negeri	1	1	-	-	1	1	2	6
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Masyarakat	-	-	1	-	1	-	2	4
5	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	-	-	-	-	-	1	3	4
TOTAL		1	1	1	3	4	6	14	30

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh usia **>50** tahun sebanyak 14 Orang (14%), diikuti usia 46-50 tahun yakni sebanyak 6 orang (6%) sedangkan selebihnya usia 41-45 tahun sebanyak 4 Orang atau (4%), usia 36-40 tahun sebanyak 3 orang (3%) dan usia 20-35 Tahun masing-masing sebanyak 1 orang (1%).

Tabel 2.6
Komposisi PNS Badan Kesbangpol
Kabupaten Bengkalis Menurut Peta Jabatan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	1	4	5
3.	Eselon IV	3	6	9
4.	Fungsional (Ahli dan Terampil)	-	-	-
5.	Fungsional dan Pelaksana (Staf)	8	7	15
TOTAL		12	18	30

Sumber: Sekretariat Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Peta Jabatan PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis masih di dominasi oleh Pelaksana sebanyak 15 orang atau (15%) sedangkan sisanya di isi oleh jabatan Struktural yakni sebanyak 15 Orang (15%) karena terdapat kekosongan untuk 2 (dua) orang pada jabatan eselon IV. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mengarahkan para ASN nya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional (Ahli dan Terampil) sebagai dasar peningkatan kompetensi jabatan di bidang intelijen dan lain sebagainya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis telah tersedia sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7
Sarana dan Prasarana pada Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis

No.	JENIS PRASARANA DAN SARANA	KONDISI			JUMLAH
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1			1
2	Sedan		2	1	3
3	Station Wagon	3		1	4
4	Pick Up	1			1
5	Sepeda Motor	8	3		11
6	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3		2	5
7	Mesin Ketik Elektronik	4			4
8	Mesin Penghitung Uang	1			1
9	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	2	1	2	5
10	Lemari Besi			1	1
11	Filling Besi/Metal	22	2	4	28
12	Brankas	1		1	2
13	Lemari Kaca	6		5	11
14	Lemari kayu	9	2		11
15	Papan Visuil	1			1
16	Alat Penghancur Kertas	10			10
17	White Board	1	2		3
18	Overhead Projektor / Infocus	2			2
19	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1			1
20	Genset	2			
21	Meja Rapat	58		1	59

22	Meja Tambahan	1			1
23	Kursi Rapat	29			29
24	Kursi Tamu	3		1	4
25	Kursi Tangan	30			30
26	Kursi Putar	26	21		47
27	Meja Komputer	4		6	10
28	Meja Piket	1			1
29	Meja Biro	30	2	14	46
30	Meubelair Lainnya	2			2
31	Jam Mekanis	7			7
32	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1			1
33	Mesin Potong Rumput	1			1
34	Lemari Es	1			1
35	AC Unit	8	1	5	14
36	AC Split	8			8
37	Kipas Angin	2			2
38	Teko Listrik		2		2
39	Televisi	8	2		10
40	Loudspeaker	1			1
41	Sound System	1			1
42	Wireless			1	1
43	Dispenser	5			5
44	Mimbar/Podium	1			1
45	Handy Cam	1			1
46	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	4		4

47	Lampu Hias	11			11
48	P.C Unit/ Komputer PC	10	8	7	25
49	Laptop	13	2	4	19
50	Printer	10	7	22	39
51	CPU			2	2
52	Monitor	1		3	4
53	Keyboard			2	2
54	Peralatan Personal Komputer Lain-lain		1		1
55	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2			2
56	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4			4
57	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3			3
58	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10			10
59	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	14			14
60	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3			3
61	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	15		1	16
62	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	2			2
63	Microphone/Wireless Mic	1			1
64	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1		1	2
65	Tripod Screen	1			1
66	Wall Screen	1			1
67	Camera Electronic	3	1		4
68	Photo Tustel		1		1
69	Facsimile	1		1	2
70	Antena SHF/Parabola Portable		1		2
71	Mast Tower		1		1

72	Switcher/Menara Antena Lain-lain	2			2
73	Exhaust Fan	14			14
74	Alat Pemadam Kebakaran	10			10
75	Meja Kerja	19			19
76	Papan Alphabet	1			1
77	Lampu Pijar	5			5
78	Proteksi Lingkungan Lain-lain	1			1
79	CCTV	6			6
80	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1			1
81	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	1			1
82	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	3			3
83	Gambar	5			5
TOTAL		485	66	88	639

Tabel di atas menjelaskan jumlah aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Polilik Kabupaten Bengkalis berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total aset yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Polilik Kabupaten Bengkalis sebanyak 635. Dari total tersebut, 485 aset memiliki kondisi yang baik. Lalu terdapat aset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 66 aset. Sedangkan aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 88 aset.

Dari kondisi aset yang masih baik dapat dikemukakan bahwa terhadap kebutuhan sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan pelayanan pada bidang urusan kesatuan bangsa dan politik. Hanya saja kebanyakan sarana dan prasarana yang ada tersebut hasil pengadaan tahun 2017 sehingga perlu banyak perawatan dan pemeliharaan.

Komposisi data tersebut juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun, didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021.

Secara keseluruhan melihat capaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis selama periode Renstra Tahun 2016-2021 indikatornya dapat dilihat dari target kinerja yang telah dicapai untuk 5 (lima) tahun, dimana realisasi **fisiknya** dengan rincian tahun 2016 sebesar 100% dengan predikat kinerja sangat tinggi, tahun 2017 sebesar 87% dengan predikat kinerja tinggi, tahun 2018 sebesar 100% dengan predikat kinerja sangat tinggi, tahun 2019 sebesar 100% dengan predikat kinerja sangat tinggi dan tahun 2020 sebesar 80% dengan predikat kinerja tinggi. Sedangkan capaian kinerja Anggaran selama 5 (lima) tahun dari total Anggaran Rp **43.576.700.953,80 yang terealisasi sebesar Rp 38.605.189.007 (88,60%)**.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, terus menerus dilakukan peningkatan pembinaan terhadap masyarakat melalui rapat koordinasi, penyuluhan maupun sosialisasi dan penyempurnaan regulasi. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Untuk lebih jelas capaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode Renstra tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut dibawah ini.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke - %				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan nilai-nilai ideologi Pancasila				%	0.4	0.4	0.5	0.5	80	18	18	36	18	67	4,500	4,500	7,200	3,600	84
2	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa				%	0.4	0.4	0.5	0.5	68	18	18	36	39	89	4,500	4,500	7,200	7,800	131
3	Persentase peran aktif masyarakat dalam proses pemilu				%	50	50	50	50	50	50	50	74	83	71.75	100	100	148	166	144
4	Persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan				%	3	3	3	4	80	40	40	40	100	0	1,333	1,333	1,333	2,500	0
5	Persentase penurunan potensi konflik				%	2.4	2.5	2.6	3	70	2	2	2	2	72	83	80	77	71	103
6	Predikat akuntabilitas kinerja				Angka	C	C	B	B	B	C	CC	C	B	B	B	B	B	B	B
7	Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator yang ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) indikator dan capaian kinerja pelayanan sudah tercapai pada beberapa indikator sesuai target pada tahun 2016-2020, namun terdapat 1 (satu) indikator yang tidak tercapai sesuai target tahun 2020 yaitu persentase organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan karena pada tahun 2020 terdapat kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan refocusing anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi covid 19.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

A. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp. 21.752.992.580 (Dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 90,31% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 24.086.150.203,78 (Dua puluh empat milyar delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu dua ratus tiga rupiah tujuh puluh delapan sen). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	5.300.000.000	4.525.003.076	85,38
2	2017	4.552.397.450	3.963.611.775	87,07
3	2018	4.223.816.416	3.804.797.124	90,08
4	2019	4.904.814.927	4.781.370.590	97,48
5	2020	5.105.121.410.78	4.678.210.015	91,64
	Jumlah	24.086.150.203,78	21.752.992.580	90,31

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp. 2.333.157.623,78 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen).

B. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah Rp. 43.576.700.953,80 (Empat puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah delapan puluh sen). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 38.605.189.007 (Tiga puluh delapan milyar enam ratus lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh rupiah) atau sebesar 88,60%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	10.476.824.340	8.917.810.839	85,12
2	2017	9.895.250.650	8.905.944.665	90,00
3	2018	7.374.090.866	6.621.311.902	89,79
4	2019	8.603.675.927	7.804.361.574	90,71
5	2020	7.226.859.170,80	6.355.760.027	87,95
Jumlah		43.576.700.953,80	38.605.189.007	88,60

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 4.971.511.946,80 (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sebelas ribu Sembilan ratus empat puluh enam ratus rupiah delapan puluh sen). Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp. 7.721.037.801,40 (Tujuh milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus satu ribu empat puluh sen) atau sejumlah Rp. 38.605.189.007 (Tiga puluh delapan puluh milyar enam ratus lima juta seratus delapan puluh sembilan puluh ribu tujuh rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 2.12
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020

Program / Kegiatan	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,300,000,000	4,552,397,450	4,223,816,416	4,904,814,927	5,105,121,410	4,525,003,076	3,963,611,775	3,804,797,124	4,781,370,590	4,678,210,015	85	87	90	97	92	-0.01	0.01
BELANJA LANGSUNG	5,176,824,340	5,342,853,200	3,150,274,450	3,698,861,000	2,121,737,760	4,392,807,763	4,942,332,890	2,816,514,778	3,022,990,984	1,677,550,012	85	93	89	82	79	-0.20	-0.21
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,582,049,740	1,336,291,235	1,473,906,100	1,463,537,700	1,002,273,700	1,498,777,023	1,336,291,235	1,471,038,914	1,373,982,658	958,405,283	95	100	100	94	96	-0.11	-0.11
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASAR	753,897,000	829,006,907	284,875,000	301,325,000	107,500,000	700,442,240	829,006,907	185,769,099	207,658,086	94,457,673	93	100	65	69	88	-0.39	-0.39

ANA APARAT UR																	
PROGR AM PENING KATAN KAPASI TAS SUMBE R DAYA APARAT UR	100,000,000	49,622,000	62,000,000	50,000,000	26,600,000	65,665,000	49,622,000	58,250,115	47,840,000	26,600,000	66	100	94	96	100	-0.28	- 0.20
PROGR AM PENING KATAN PENGE MBANG AN SISTEM PELAPO RAN CAPAIA N KINERJ A DAN KEUAN GAN	99,876,100	14,414,400	39,766,900	60,835,600	78,000,000	90,235,100	14,414,400	35,183,300	53,896,200	78,000,000	90	100	88	89	100	-0.06	- 0.04
PROGR AM PENING KATAN KEAMA	291,808,300	-	-	-	-	96,054,800	-	-	-	-	33	0	0	0	0	-1.00	- 1.00

NAN DAN KENYA MANA N LINGKU NGAN																	
PROGR AM PENGE MBANG AN WAWA SAN KEBAN GSAAN	474,182,700	724,637,000	421,007,400	250,195,400	341,893,000	415,431,900	657,516,600	386,096,700	234,650,400	137,481,858	88	91	92	94	40	-0.08	-0.24
PROGR AM KEMITR AAN PENGE MBANG AN WAWA SAN KEBAN GSAAN	199,698,100	679,352,600	565,790,050	373,365,300	304,006,000	181,104,000	511,426,400	404,237,750	340,785,300	167,679,000	91	75	71	91	55	0.11	-0.02
PROGR AM PEMBE RDAYA AN MASYA RAKAT UNTUK MENJA	845,257,400	-	-	-	-	553,150,700					65	0	0	0	0	-1.00	-1.00

GA KETERTI BAN DAN KEAMA NAN																	
PROGR AM PENDID IKAN POLITIK MASYA RAKAT	830,064,000	1,144,871,000	420,920,300	1,104,602,000	460,032,000	792,037,000	965,097,400	373,938,900	764,177,340	411,489,000	95	84	89	69	89	-0.14	-0.15

Tabel di atas dapat dijelaskan beberapa catatan atas informasi kinerja anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 antara lain adalah :

1. Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2020 pada belanja tidak langsung minus sebesar -0,01% dan rata-rata pertumbuhan realisasinya sebesar 0,01%, hal ini dikarenakan reasliasi pertahun tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan keuangan Pemerintah Daerah sedangkan untuk belanja langsung rata-rata pertumbuhan minus dikarenakan prioritas anggaran dialokasikan pada peningkatan kegiatan prioritas lainnya, kebijakan keuangan Pemerintah Daerah serta lemahnya sistem perencanaan dan penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan dalam kondisi baik yaitu pada tahun 2016. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran dalam kondisi kurang baik pada tahun 2018, 2019 dan 2020, karena pada tahun tersebut jelas terlihat kesenjangan antara realisasi dan anggaran, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada tahun tersebut.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator, *outcome* program, maupun *output* kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu

dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.13
Analisis lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan)

Internal	
Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. 2. Tersedianya Pegawai 3. Tersedianya sarana dan prasarana dan pelayanan administrasi perkantoran 4. Tersedianya pagu anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis pada APBD Kabupaten Bengkalis 5. Loyalitas, integritas, kebersamaan (team building) pejabat dan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan visi dan misi Nasional, Provinsi, Kabupaten Bengkalis serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kuantitas (jumlah) dan kapasitas/kompetensi sumber daya aparatur/pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana. 3. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan yang prima 4. Terbatasnya pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yang dialokasikan pada APBD Kabupaten Bengkalis 5. Belum optimalnya pembinaan peranan Partai Politik dan lembaga pendidikan 6. Belum optimalnya implementasi pembinaan pendidikan politik bagi masyarakat dan pemilih pemula. 7. Belum optimalnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan ormas asing di Kabupaten Bengkalis 8. Belum optimalnya pemberdayaan dan pembinaan FKUB, FPK dan FKDM.

Kabupaten Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> 9. Belum optimalnya implementasi program ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama 10. Belum optimalnya implementasi program pembinaan Tim P4GN 11. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, Bela Negara, penguatan karakter bangsa dan Gerakan Nasional Revolusi Mental. 12. Belum optimalnya implementasi program kewaspadaan dini daerah, penanganan konflik dan sosialisasi bahaya terorisme dan radikalisme 13. Belum optimalnya pengawasan orang asing
---------------------	---

Dari analisis lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan) dapat dilihat bahwa pada kondisi PNS Badan Kesbangpol menurut jenis kelamin, golongan, tamatan, usia dan peta jabatan, dapat disimpulkan bahwa masih sangat belum optimal sarana dibidang SDM karena akan ada PNS yang memasuki batas usia pensiun sedangkan jumlah/kapasitas PNS memang sedikit jumlahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan pada suatu Badan seperti Badan Kesbangpol.

Sedangkan untuk prasarana sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan juga sangat perlu adanya penambahan prasarana baru khusus alat alat elektronik sebagai media yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan OPD. Mengingat prasarana yang ada lebih banyak dalam kondisi rusak dan hanya sedikit yang dalam kondisi baik untuk operasional masing-masing bidang.

Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pun masih belum optimal dan sesuai target karena keterbatasan anggaran dan adanya kebijakan prioritas anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pusat untuk mendukung program unggulan Bupati dan wakil Bupati Bengkalis serta penanganan pandemi covid 19.

Tabel 2.14

Analisis lingkungan Eksternal (Tantangan dan Peluang)

Eksternal	
Tantangan (T)	Peluang (U)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Era Globalisasi dan kemajuan Teknologi informatika menuntut kompetensi/kualitas sumber daya aparatur. 2. Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, Bela Negara, Pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan. 3. Belum optimalnya Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika dan Budaya Politik, Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. 4. Belum Optimalnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 5. Belum optimalnya pelaksanaan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah. 6. Belum Optimalnya Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial, Koordinasi Kewaspadaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan nasional dan Peraturan Perundang-undangan terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik kabupaten Bengkalis. 2. Berkembangnya Teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan administrasi perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. 3. Adanya kebijakan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkalis. 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis serta Rencana Strategis , Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. 5. Adanya koordinasi dan dukungan dari organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis, instansi vertikal, dan forum dan organisasi kemasyarakatan

Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah	
---	--

Dari tantangan dan peluang analisis eksternal dapat disimpulkan bahwa masing-masing program akan dioptimalkan capaian terhadap indikatornya karena sangat menentukan tercapainya sasaran, tujuan dan target periode Renstra Tahun 2021-2026.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dimaksud Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional.
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan
- g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Dengan demikian Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja, dapat dirumuskan permasalahan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah **"Meningkatkan Peranan dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik"**. Permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang diantaranya

1. Permasalahan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat

beberapa sumber masalah berikut :

- a. Belum optimalnya Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan.
 - b. Belum optimalnya pembinaan karakter bangsa.
2. Permasalahan pada Bidang Politik Dalam Negeri. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
- a. Belum optimalnya pembinaan pendidikan politik masyarakat.
 - b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
 - c. Belum optimalnya pembinaan terhadap partai politik.
3. Permasalahan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan. Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat beberapa sumber masalah berikut :
- a. Belum optimalnya pembinaan terhadap ketahanan ekonomi, sosial, budaya.
 - b. Belum optimal pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan program P4GN.
4. Permasalahan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.:
- a. Belum optimalnya peningkatan kewaspadaan dini daerah.
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan konflik sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Badan Kesbangpol sebagai berikut.

3.1
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
Dalam Pelayanan Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Meningkatkan Peranan dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik	Permasalahan dalam Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan b. Belum optimalnya pembinaan karakter bangsa
	Permasalahan dalam Bidang Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pembinaan pendidikan politik masyarakat b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu c. Belum optimalnya pembinaan terhadap partai politik
	Permasalahan dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pembinaan terhadap ketahanan ekonomi, sosial, budaya b. Belum optimal pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan c. Belum optimalnya pelaksanaan program P4GN
	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya peningkatan kewaspadaan dini daerah b. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan konflik sosial

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas kinerja menuju lebih baik. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah

pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas- tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaan penganggaran.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera"***

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan

Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dan Bupati Bengkalis yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD. Misi Ke Dua Bupati Bengkalis **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter”**, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan harmonis, hal ini sejalan dengan strategi dan arah kebijakan yang ditempuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.

Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi Pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021 - 2026 harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik struktur tata ruang maupun pola ruang. Selanjutnya Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan paling aplikatif dari RPJMD.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan harmonis	1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu	1.1. Penguatan peran dan partisipatif agamawan dan kelompok-kelompok masyarakat	1.1.1. Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat di semua level
	2. Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olahraga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	2.1. Jumlah penghuni tindak pidana Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis	2.1.1. Fungsionalisasi kelembagaan serta peran dan fungsi Badan Nasiona Narkotika Kabupaten

Sementara tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan sebagai wujud penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik, yaitu ***Terwujudnya penguatan Kesatuan Bangsa dan partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Bengkalis*** dengan indikator tujuan Peningkatan pembinaan nilai-nilai ideologi dan pendidikan politik masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain adalah :

1. Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
3. Meningkatnya pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan indikator sasaran terdiri dari :

1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
2. Persentase partisipasi politik masyarakat .
3. Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan
4. Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran RENSTRA Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis terkait dengan RENSTRA Kementerian Dalam Negeri karena Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Provinsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

Periode Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024, sedangkan Periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024.

Berdasarkan Analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memiliki Program Prioritas sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
2. Program Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri;
4. Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

5. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
6. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Sedangkan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, ada 5 (lima) Program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
5. Program Pendidikan Politik.

Adapun jumlah Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis ada 6 (enam), yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Dalam hal ini tidak terdapat program yang tidak sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri karena pada tahun 2021 program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hal ini juga dikarenakan masa Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sedangkan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 maka terdapat perubahan regulasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Visi Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Visi tersebut dijabarkan kepada misi dan selanjutnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan visi tersebut di atas, ditemukan keterkaitannya dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis yaitu bagaimana mengoptimalkan kinerja Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis juga berimplikasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri khusus pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait Tugas dan Fungsi

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian Timur Pulau Sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas 8.403,28 km², , dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Negara Malaysia;
- Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Barat berbatasan dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Bengkalis memiliki garis pantai dengan panjang lebih kurang 722 km yang tersebar pada 16 buah pulau-pulau besar dan kecil. Terdapat 2 (dua) buah pulau besar, yakni pulau Bengkalis (938,40 km²) dan Pulau Rupat (1.524,84 km²). Ibukota Kabupaten Bengkalis yang merupakan pusat Pemerintahan berada di Pulau Bengkalis.

Secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada kawasan perbatasan yang sangat strategis secara potensi ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, berada di tepi Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu alur pelayaran yang tersibuk di dunia. Secara ekonomi Wilayah Kabupaten termasuk pada kawasan segitiga Pertumbuhan Indonesia- Malaysia- Singapura atau Indonesia-Malaysia Singapura Growth Triangle (IMS-GT) dan kawasan segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia Thailand atau Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Wilayah Kabupaten Bengkalis berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Bengkalis adalah salah satu wilayah atau beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan, karena mempengaruhi kedaulatan wilayah negara, hubungan internasional, dan stabilitas keamanan dalam negeri. Demikian pula dari sudut pandang sosial dan ekonomi, sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Bengkalis memiliki potensi strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, karena memiliki akses pintu masuk barang dan mobiltas orang dari dan ke negara tetangga, melalui pelabuhan laut internasional yang resmi di Selatbaru, serta beberapa pelabuhan lintas batas.

Kendatipun demikian letak geografis Kabupaten Bengkalis yang strategis dan merupakan kawasan perbatasan demikian, disamping memiliki potensi yang menguntungkan baik aspek ekonomi, sosial serta budaya, juga jika tidak diwaspadai akan memberikan dampak, terutama memiliki potensi kerawanan antara lain dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melakukan tindak kejahatan transnasional (transnasional crime), penyelundupan barang-barang illegal, Imigran gelap, pintu masuknya orang atau kelompok yang membawa paham radikalisme, kejahatan peredaran gelap narkoba dan sebagainya.

Letak yang sangat strategis ini memiliki implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya, namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, berbagai permasalahan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri, sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. Sehingga isu strategis ditetapkan adalah ***Belum optimalnya Peranan dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bengkalis.***

Adapun Identifikasi isu strategis pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026**

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
A	Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik									
I	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase partisipasi politik masyarakat	Persen	70	70	70	70	70	70	70	70
3	Jumlah pengurus organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba	Persen	10	10	10	10	10	10	10	10

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka untuk mencapai Visi serta untuk melaksanakan Misi Kepala Daerah tersebut di atas, dan juga untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2021-2026. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkalis sampai dengan Tahun 2026. Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai pendukung Misi Kedua sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dengan tujuan yaitu ***Terwujudnya penguatan Kesatuan Bangsa dan partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Bengkalis.***

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yaitu :

1. Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
3. Meningkatnya pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis terdiri dari :

1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
2. Persentase partisipasi politik masyarakat .
3. Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan
4. Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya penguatan Kesatuan Bangsa dan partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Bengkalis	Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang komendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatnya pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika	10%	10%	10%	10%	10%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan agar selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD periode Tahun 2021 – 2026, adapun strategi yang ditempuh antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan harmonis	1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan budaya melayu	2.2. Penguatan peran dan partisipatif agamawan dan kelompok-kelompok masyarakat	2.2.1. Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat di semua level
	2. Terwujudnya peran serta pemuda mendukung prestasi olahraga dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	2.3. Jumlah penghuni tindak pidana Narkoba Lapas kelas II A Bengkalis	2.3.1. Fungsionalisasi kelembagaan serta peran dan fungsi Badan Nasiona Narkotika Kabupaten

Sementara strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis antara lain :

- Membina karakter dan mental yang berwawasan kebangsaan, penerapan nilai-nilai Pancasila, keragaman suku, agama dan peningkatan rasa nasionalisme kepada masyarakat.
- Membina kesadaran politik masyarakat.

- Meningkatkan peran masyarakat, pemilih pemula dan perempuan dalam demokrasi melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan baik melalui media (elektronik dan publikasi) dan tatap muka.
- Meningkatkan Peremberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan
- Meningkatkan kualitas kerjasama pencegahan dan penanggulangan narkoba

Adapun beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2021 - 2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan mental dan karakter yang berwawasan kebangsaan, peningkatan rasa nasionalisme/bela negara
- Menyelenggarakan kerjasama peningkatan kualitas pendidikan politik kepada fungsionaris parpol dan pengurus lembaga pendidikan
- Mengoptimalkan fungsi penyuluhan dan sosialisasi media kepada masyarakat
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kepada Organisasi Kemasyarakatan
- Mengefektifkan dan mengoptimalkan Tugas dan Fungsi Tim P4GN dan BNNK

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.1. Rencana Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program. Untuk mencapai Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terdapat sejumlah program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah periode 2021-2026, strategi ini merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan.

Program-program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social.

1.2. Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka masing-masing Program dirumuskan sejumlah kegiatandan disetiap kegiatan dirumuskan pula beberapa sub kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output). Kegiatan yang terdiri dari sejumlah sub kegiatan adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji danTunjangan ASN.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Mebel;
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela negara, karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Binneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

III. PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - b. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

VI. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														BIDANG PENANGGUNG JAWAB
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KIENRJA PADA AKHIR PERIODE		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	-4	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Aparatur	PROGRAM PUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI KANTOR (UMUM DAN KEPEGAWAIAN)	100%	100%	7,429,296,208	100%	10,433,710,008	100%	15,944,381,000	100%	15,971,381,000	100%	12,955,381,000	100%	8,883,400,000	100%	71,617,549,216	Sekretariat
	Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen / penyusunan perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja PD yang tersedia	6 Dok/Laporan	6 Dok	188,954,700	8 Dokumen	223,329,008	8 Dokumen	340,000,000	8 Dokumen	415,000,000	8 Dokumen	415,000,000	8 Dokumen	415,000,000	8 Dokumen	1,997,283,708	Sekretariat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia	6 Dokumen	6 Dokumen	161,882,300	3 Dokumen	173,329,008	3 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	1,285,211,308	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Jumlah DPA-SKPD yang diakomodir	1 Dokumen	1 Dokumen	15,538,800	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	175,538,800	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diakomodir	1 Dokumen	1 Dokumen	11,533,600	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	121,533,600	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Resalisasi Kinerja SKPD	4 Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun Perangkat Daerah	-	-	-	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	215,000,000	Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat

Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan bagi ASN pada Badan Kesbangpol	100%	100%	5,306,134,617	100%	5,550,000,000	100%	5,600,000,000	100%	5,600,000,000	100%	5,600,000,000	100%	5,600,000,000	100%	5,600,000,000	100%	33,256,134,617	Sekretariat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	5,306,134,617	1 Tahun	5,550,000,000	1 Tahun	5,600,000,000	1 Tahun	5,600,000,000	1 Tahun	5,600,000,000	1 Tahun	5,600,000,000	1 Tahun	5,600,000,000	1 Tahun	33,256,134,617	Sekretariat
Terlaksananya pengelolaan barang dan aset milik PD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang yang dikuasai SKPD	100%	100%	115,200,000	100%	115,200,000	100%	115,200,000	100%	115,200,000	100%	115,200,000	100%	115,200,000	100%	115,200,000	100%	691,200,000	Sekretariat
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Jumlah Tenaga pengamanan aset SKPD	6 Orang	6 Orang	115,200,000	6 Orang	115,200,000	6 Orang	115,200,000	6 Orang	115,200,000	6 Orang	115,200,000	6 Orang	115,200,000	6 Orang	115,200,000	6 Orang	691,200,000	Sekretariat
Terlaksananya pengelolaan manajemen kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian bagi ASN pada Badan Kesbangpol	16 Orang	16 Orang	114,340,000	16 Orang	80,000,000	16 Orang	150,000,000	16 Orang	200,000,000	16 Orang	200,000,000	16 Orang	200,000,000	16 Orang	200,000,000	16 Orang	944,340,000	Sekretariat
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	16 Orang	16 Orang	114,340,000	16 Orang	80,000,000	16 Orang	150,000,000	16 Orang	200,000,000	16 Orang	200,000,000	16 Orang	200,000,000	16 Orang	200,000,000	16 Orang	944,340,000	Sekretariat
Terlaksananya penyelenggaraan dan kebutuhan umum PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum pada Badan Kesbangpol	100%	100%	976,363,200	100%	895,000,000	100%	1,129,000,000	100%	1,226,000,000	100%	1,240,000,000	100%	1,245,000,000	100%	1,245,000,000	100%	6,711,363,200	Sekretariat
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik yang tersedia	10 Item	10 Item	9,635,000	10 Item	10,000,000	10 Item	12,000,000	10 Item	13,000,000	10 Item	15,000,000	10 Item	15,000,000	10 Item	15,000,000	10 Item	74,635,000	Sekretariat
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Jumlah alat kebersihan dan alat tulis kantor yang tersedia	80 Item	80 Item	85,575,600	80 Item	90,000,000	80 Item	100,000,000	85 Item	90,000,000	86 Item	100,000,000	87 Item	100,000,000	87 Item	100,000,000	87 Item	565,575,600	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	Jumlah makan dan minum rapat untuk pelaksanaan rapat dan petugas	2416 Kotak	2416 Kotak	72,260,000	2500 Kotak	73,000,000	2500 Kotak	75,000,000	2500 Kotak	76,000,000	2500 Kotak	76,000,000	2500 Kotak	76,000,000	2500 Kotak	76,000,000	2500 Kotak	448,260,000	Sekretariat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	10 Item	10 Item	55,347,600	10 Item	50,000,000	12 Item	70,000,000	13 Item	70,000,000	15 Item	72,000,000	15 Item	72,000,000	15 Item	72,000,000	15 Item	389,347,600	Sekretariat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	66 Exemplar	66 Exemplar	9,900,000	66 Eksamplar	12,000,000	66 Eksamplar	12,000,000	66 Eksamplar	12,000,000	66 Eksamplar	12,000,000	66 Eksamplar	12,000,000	66 Eksamplar	12,000,000	66 Eksamplar	69,900,000	Sekretariat

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan ke dalam dan luar daerah	100 Kali	100 Kali	585,045,000	100 Kali	500,000,000	130 kali	700,000,000	130 kali	800,000,000	130 kali	800,000,000	130 kali	800,000,000	130 kali	4,185,045,000	Sekretariat
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7	Jumlah media online yang tersedia	1 Media	1 Media	158,600,000	1 Media	160,000,000	1 Media	160,000,000	1 Media	165,000,000	1 Media	165,000,000	1 Media	170,000,000	1 Media	978,600,000	Sekretariat
	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang PD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan aset sebagai penunjang urusan Kesatuan bangsa dan politik	100%	100%	108,160,000	100%	120,000,000	100%	1,000,000,000	100%	200,000,000	100%	210,000,000	100%	210,000,000	100%	1,848,160,000	Sekretariat
		Pengadaan Mebel	1	Jumlah mebel kantor yang disediakan	2 Item	2 Item	19,539,000	6 Item	40,000,000	5 Item	50,000,000	5 Item	50,000,000	6 Item	60,000,000	6 Item	60,000,000	6 Item	279,539,000	Sekretariat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	88,621,000	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	768,621,000	Sekretariat
		Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	3	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang tersedia	-	-	-	-	-	2 Unit	800,000,000	-	-	-	-	-	-	2 Unit	800,000,000	Sekretariat
	Terlaksananya penunjang urusan PD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Kesatuan bangsa dan politik	100%	100%	229,905,691	100%	234,200,000	100%	244,200,000	100%	244,200,000	100%	244,200,000	100%	244,200,000	100%	1,440,905,691	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah penyediaan jasa surat menyurat dan jasa administrasi	1 Tahun	1 Tahun	73,950,000	1 Tahun	75,000,000	1 Tahun	75,000,000	1 Tahun	75,000,000	1 Tahun	75,000,000	1 Tahun	75,000,000	1 Tahun	448,950,000	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa listrik, air dan komunikasi	1 Tahun	1 Tahun	136,755,691	1 Tahun	140,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	876,755,691	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa pelayanan umum yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	19,200,000	1 Tahun	19,200,000	1 Tahun	19,200,000	1 Tahun	19,200,000	1 Tahun	19,200,000	1 Tahun	19,200,000	1 Tahun	115,200,000	Sekretariat
	Terlaksananya pemeliharaan barang PD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset penunjang urusan Kesatuan bangsa dan politik	100%	100%	390,238,000	100%	524,000,000	100%	734,000,000	100%	784,000,000	100%	844,000,000	100%	854,000,000	100%	4,130,238,000	Sekretariat

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	3 Unit	3 Unit	132,837,000	6 Unit	200,000,000	6 Unit	300,000,000	6 Unit	350,000,000	6 Unit	350,000,000	6 Unit	350,000,000	6 Unit	1,682,837,000	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	153,600,000	1 Tahun	154,000,000	1 Tahun	154,000,000	1 Tahun	154,000,000	1 Tahun	154,000,000	1 Tahun	154,000,000	1 Tahun	923,600,000	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	103,801,000	12 Item	70,000,000	1 Tahun	130,000,000	1 Tahun	130,000,000	1 Tahun	140,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	723,801,000	Sekretariat
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	-	-	-	4 Item	100,000,000	5 Item	150,000,000	8 Item	150,000,000	10 Item	200,000,000	10 Item	200,000,000	10 Item	800,000,000	Sekretariat
Terwujudnya Nilai-nilai Kesatuan dan Politik Masyarakat Kabupaten Bengkulu	Meningkatnya kualitas ideologi masyarakat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kesadaran bela negara masyarakat	100%	100%	329,071,700	100%	270,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	100%	599,071,700	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	Terlaksananya pembinaan dan pematapan penerapan Ideologi Pancasila	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	194,005,100	100%	240,000,000	0%	-	-	-	-	-	-	-	100%	434,005,100	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	Terlaksananya pembinaan dan pematapan wawasan kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka	1 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	80 Orang/40 Orang/Kecamatan	80 Orang/40 Orang/Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 Orang/40 Orang/Kecamatan	-	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan nasionalisme dan ideologi pancasila	40 Orang/Kecamatan	40 Orang/Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Orang/Kecamatan	-	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

			3	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100 Orang /50 Orang/ Kecamatan	100 Orang /50 Orang/ Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 Orang/40 Orang/ Kecamatan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
			4	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	30 Orang/Kecamatan	30 Orang/Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Orang/Kecamatan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
			5	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Pembaauran Kebangsaan (FPK)	-	-	1 Forum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
			6	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan wawasan kebangsaan	-	-	40 Orang/Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 Orang/Kecamatan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
			7	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional NKRI	-	-	80 Orang /40 Orang/ Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 Orang /40 Orang/ Kecamatan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
			8	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan peningkatan kesadaran bela negara	-	-	80 Orang/2 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 Orang/2 Kecamatan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

			9	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang pembauran kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			10	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
	Terlaksananya pembinaan dan pemantapan wawasan kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila	80 Orang/40 Orang/Kecamatan	-	-	-	-	60 Orang/30 Orang/Kecamatan	65,000,000	120 Orang /40 Orang/Kecamatan	200,000,000	120 Orang /40 Orang/Kecamatan	200,000,000	120 Orang /40 Orang/Kecamatan	200,000,000	3 Kecamatan	665,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
			2	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan nasionalisme dan ideologi pancasila	40 Orang/Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Kecamatan	300,000,000	4 Kecamatan	300,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			3	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	100 Orang /50 Orang/Kecamatan	100 Orang /50 Orang/Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Kecamatan	300,000,000	4 Kecamatan	300,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			4	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	30 Orang/Kecamatan	30 Orang/Kecamatan	-	-	-	-	-	-	3 Kecamatan	300,000,000	3 Kecamatan	300,000,000	3 Kecamatan	600,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			5	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	

			6	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan pendidikan wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-	120 Orang/3 Kecamatan	150,000,000	120 Orang /3 Kecamatan	150,000,000	120 Orang /3 Kecamatan	150,000,000	120 Orang /3 Kecamatan	150,000,000	120 Orang /3 Kecamatan	600,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			7	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional NKRI	-	-	-	-	-	160 Orang/40 Orang/ Kecamatan	180,000,000	160 Orang /40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	160 Orang /40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	160 Orang /40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	160 Orang	1,080,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			8	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan peningkatan kesadaran bela negara	-	-	-	-	-	160 Orang/4 Kecamatan	180,000,000	160 Orang /4 Kecamatan	300,000,000	160 Orang /4 Kecamatan	300,000,000	160 Orang /4 Kecamatan	300,000,000	160 Orang /4 Kecamatan	1,080,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			9	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang pembaauran kebangsaan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	60,000,000	1 Kegiatan	60,000,000	1 Kegiatan	60,000,000	1 Kegiatan	230,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			10	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bengkalis	-	120,000,000	-	-	-	-	-	120,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	Terlaksananya koordinasi bidang ideologi dan wawasan kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Jumlah koordinasi dan pertemuan anggota FPK	27 Orang	27 Orang	135,066,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,066,600	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	

			2	Jumlah pertemuan dan koordinasi oleh Tim Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	-	-	-	42 Orang	30,000,000	1 Kegiatan	35,000,000	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	65,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			3	Jumlah pertemuan pembinaan pembauran kebangsaan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	40,000,000	1 Kegiatan	40,000,000	-	-	-	1 Kegiatan	80,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
			4	Persentase hibah untuk FPK	-	-	-	-	-	1 Forum	200,000,000	1 Forum	250,000,000	1 Forum	250,000,000	1 Forum	250,000,000	1 Forum	950,000,000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase partisipasi politik masyarakat	100%	100%	1,776,017,300	100%	1,751,981,000	100%	4,166,981,000	100%	4,586,981,000	100%	3,026,981,000	100%	3,066,981,000	100%	18,375,922,300	Bidang Politik Dalam Negeri
	Terlaksananya pemantapan dan peran serta masyarakat dalam bidang politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase pemantapan dibidang Pendidikan Politik	100%	100%	1,776,017,300	100%	1,751,981,000	100%	4,166,981,000	100%	4,586,981,000	100%	3,026,981,000	100%	3,066,981,000	100%	18,375,922,300	Bidang Politik Dalam Negeri

	Terlaksananya pembinaan dibidang pendidikan politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	Jumlah Fungsionaris Parpol yang mendapatkan pemahaman sosialisasi tentang undang-undang partai politik	50 Orang	50 Orang	79,976,600	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	79,976,600	Bidang Politik Dalam Negeri		
			2	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	-	-	-	80 Orang (40 Orang/ Kecamatan)	75,000,000	440 Orang/40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	440 Orang/40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	550 Orang/50 Orang/ Kecamatan	350,000,000	550 Orang/50 Orang/ Kecamatan	350,000,000	550 Orang/50 Orang/ Kecamatan	1,375,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri
			3	Jumlah Pemilih Pemula yang mendapatkan Pendidikan politik tentang Pemilu	-	-	-	40 Orang/ Kecamatan	50,000,000	440 Orang/40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	440 Orang/40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	550 Orang/50 Orang/ Kecamatan	350,000,000	550 Orang/50 Orang/ Kecamatan	350,000,000	550 Orang/50 Orang/ Kecamatan	1,350,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri
			4	Jumlah Fungsionaris Parpol yang mendapatkan pendidikan politik tentang peraturan perundang-undangan partai politik	-	-	-	-	-	35 Orang	50,000,000	50 Orang	80,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	330,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri
			5	Jumlah Pemilih yang Berbasis Gender yang mendapat Pendidikan politik tentang Pemilu	-	-	-	-	-	330 Orang/30 Orang/ Kecamatan	270,000,000	440 Orang/40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	550 Orang/50 Orang/ Kecamatan	350,000,000	550 Orang/50 Orang/ Kecamatan	350,000,000	550 Orang/50 Orang/ Kecamatan	1,270,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri
			6	Jumlah Fungsionaris Parpol yang mendapatkan pembinaan tentang Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol	-	-	-	-	-	50 Orang	80,000,000	50 Orang	80,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	100,000,000	50 Orang	360,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri
			7	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Badan Legislatif	-	-	-	-	-	330 Orang/30 Orang/ Kecamatan	270,000,000	330 Orang/30 Orang/ Kecamatan	270,000,000	-	-	-	-	330 Orang/30 Orang/ Kecamatan	540,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri

			8	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	440 Orang/40 Orang/ Kecamatan	350,000,000	330 Orang/30 Orang/ Kecamatan	270,000,000	-	-	-	330 Orang/30 Orang/ Kecamatan	620,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri	
			9	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi melalui Media Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Badan Legislatif	-	-	-	-	-	205 Lembar, 275 Durasi	250,000,000	410 Lembar, 550 Durasi	300,000,000	-	-	-	410 Lembar, 550 Durasi	550,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri	
			10	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi melalui Media Cetak dan Elektronik dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	820 Lembar, 1100 Durasi	300,000,000	820 Lembar, 1100 Durasi	350,000,000	-	-	-	820 Lembar, 1100 Durasi	650,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri	
	Terlaksananya koordinasi di bidang pendidikan politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah/Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	1	Jumlah dokumen administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik	11 Dokumen	11 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Dokumen	-	Bidang Politik Dalam Negeri	
			2	Jumlah partai Politik yang mendapat bantuan	11 Parpol	11 Parpol	1,696,040,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Parpol	1,696,040,700	

			3	Jumlah dokumen administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik yang di Verifikasi	11 Dokumen	11 Dokumen	-	11 Dokumen	40,000,000	11 Dokumen	60,000,000	11 Dokumen	80,000,000	11 Dokumen	100,000,000	11 Dokumen	120,000,000	11 Dokumen	400,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri
			4	Jumlah Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan	-	-	-	11 Partai Politik	1,586,981,000	11 Partai Politik	1,596,981,000	11 Partai Politik	1,606,981,000	11 Partai Politik	1,616,981,000	11 Partai Politik	1,626,981,000	11 Partai Politik	8,034,905,000	Bidang Politik Dalam Negeri
			5	Persentase Rapat Koordinasi Dukungan Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	200 Orang	300,000,000	200 Orang	300,000,000	-	-	-	-	200 Orang	300,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri
	Terlaksananya monitoring , evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	1	Jumah monitoring Pengumpulan Data Keberadaan Partai Politik di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	11 Kecamatan	40,000,000	11 Kecamatan	50,000,000	11 Kecamatan	60,000,000	11 Kecamatan	70,000,000	11 Kecamatan	220,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri
			2	Persentase Pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan dengan Baik dan Lancar dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Legislatif dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	11 Kecamatan	300,000,000	-	-	-	-	11 Kecamatan	300,000,000	Bidang Politik Dalam Negeri
	Meningkatnya peran Organisasi Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase pembinaan kepada Ormas	100%	100%	77,120,000	100%	100,000,000	100%	190,000,000	100%	240,000,000	100%	240,000,000	100%	260,000,000	100%	1,107,120,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Terlaksananya pembinaan dan pemantapan perberdayaan serta pengawasan organisasi masyarakat	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan	100%	100%	77,120,000	100%	100,000,000	100%	190,000,000	100%	240,000,000	100%	240,000,000	100%	260,000,000	100%	1,107,120,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	Jumlah anggota Ormas mendapatkan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Ke-Ormasan	50 LSM	50 LSM	47,200,000	60 Orang/30 Orang/ Kecamatan	50,000,000	90 Orang (30 Orang/ Kecamatan)	80,000,000	90 Orang (30 Orang/ Kecamatan)	80,000,000	90 Orang (30 Orang/ Kecamatan)	100,000,000	90 Orang (30 Orang/ Kecamatan)	100,000,000	90 Orang (30 Orang/ Kecamatan)	457,200,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			2	Jumlah Ormas dan LSM yang mendapatkan pembinaan Organisasi	-	-	-	-	-	40,000,000	30 Orang (dari 20 Lembaga)	40,000,000	30 Orang (dari 20 Lembaga)	50,000,000	30 Orang (dari 20 Lembaga)	60,000,000	30 Orang (dari 20 Lembaga)	190,000,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	Jumlah pertemuan dan koordinasi Penanganan Masalah Ke-Ormasan	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	40,000,000	-	-	-	-	1 Kegiatan	40,000,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
			2	Jumlah koordinasi dan dialog Forum Tokoh Adat, Kesultanan dan Ormas Kebudayaan terkait Nilai Budaya Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1	Jumlah pemantauan pendataan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	50 LSM	50 LSM	29,920,000	11 Kecamatan	50,000,000	11 Kecamatan	70,000,000	11 Kecamatan	80,000,000	11 Kecamatan	90,000,000	11 Kecamatan	100,000,000	11 Kecamatan	419,920,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			2	Frekuensi Pelaksanaan pengawasan Verifikasi Penerima Bantuan Hibah di Kabupaten Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Jumlah penurunan penghuni tindak pidana narkotika Lapas Kelas II A Bengkalis	1.085 Orang	900 Orang	573,403,600	900 Orang	290,000,000	850 Orang	830,000,000	800 Orang	710,000,000	750 Orang	820,000,000	600 Orang	820,000,000	600 Orang	4,043,403,600	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase pembinaan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	100%	573,403,600	100%	290,000,000	100%	830,000,000	100%	710,000,000	100%	820,000,000	100%	820,000,000	100%	4,043,403,600	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemahaman Bahaya penyalahgunaan peredaran/penggunaan Minuman keras dan narkoba	160 Orang/40 Orang/ Kecamatan	160 Orang/40 Orang/ Kecamatan	399,563,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 Orang/40 Orang/ Kecamatan	399,563,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			2	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan penyuluhan Bahaya Narkotika dan Miras	-	-	-	120 Orang/ 40 Orang/ Kecamatan	150,000,000	200 Orang (40 Orang/ Kecamatan)	270,000,000	240 Orang/ 40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	440 Orang/40 Orang/ Kecamatan	350,000,000	440 Orang/40 Orang/ Kecamatan	350,000,000	440 Orang/40 Orang/ Kecamatan	1,420,000,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	Jumlah koordinasi dan pertemuan anggota Bakorpakem	50 Orang	50 Orang	173,840,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	173,840,600	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			2	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	-	-	-	1 Forum	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Forum	100,000,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			3	Jumlah Koordinasi dan pertemuan anggota FKUB	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	-	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

			4	Jumlah pertemuan dan koordinasi oleh Tim P4GN	-	-	-	40 Orang	40,000,000	40 Orang	50,000,000	40 Orang	50,000,000	40 Orang	50,000,000	40 Orang	240,000,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
			5	Persentase Hibah untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	-	-	-	-	-	1 Forum	200,000,000	1 Forum	200,000,000	1 Forum	250,000,000	1 Forum	250,000,000	1 Forum	900,000,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			6	Jumlah pertemuan dan koordinasi bersama Lembaga Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			7	Jumlah pertemuan dan koordinasi oleh BAKORPAKEM	-	-	-	-	-	50 Orang	150,000,000	50 Orang	160,000,000	50 Orang	170,000,000	50 Orang	170,000,000	50 Orang	650,000,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			8	Jumlah anggota Lembaga Ekonomi dan Sumber Daya Alam berpotensi Konflik yang mengikuti Forum Dialog	-	-	-	-	-	100 Orang	70,000,000	-	-	-	-	-	-	100 Orang	70,000,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			9	Jumlah Forum Dialog Kerukunan Umat Beragama	-	-	-	-	-	40 Orang/ Kecamatan	50,000,000	-	-	-	-	-	-	40 Orang/ Kecamatan	50,000,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			10	Jumlah kelompok Pelaku Usaha Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang diidentifikasi terkait Kewaspadaan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	1	Jumlah Pemantauan Perkembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	-	-	-	-	-	11 Kecamatan	40,000,000	-	-	-	-	-	-	11 Kecamatan	40,000,000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2	Jumlah Data sumber alam yang berpotensi dihimpun dalam wilayah Kabupaten Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

	Meningkatnya kerukunan antar masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	100%	100%	128,949,000	100%	280,000,000	100%	1,445,000,000	100%	1,650,000,000	100%	-	100%	-	100%	3,503,949,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di daerah	100%	100%	128,949,000	100%	230,000,000	100%	1,445,000,000	100%	1,450,000,000	100%	-	100%	-	100%	3,253,949,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat	-	-	-	-	-	330 Orang /30 Orang/ Kecamatan	270,000,000	440 Orang /40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	440 Orang /40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	440 Orang /40 Orang/ Kecamatan	300,000,000	440 Orang /40 Orang/ Kecamatan	1,170,000,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
			2 Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan penyuluhan tentang bahaya terorisme dan radikalisme	-	-	-	-	-	200 Orang/40 Orang/ Kecamatan	185,000,000	200 Orang/40 Orang/ Kecamatan	200,000,000	200 Orang/40 Orang/ Kecamatan	200,000,000	200 Orang/40 Orang/ Kecamatan	230,000,000	200 Orang/40 Orang/ Kecamatan	815,000,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Jumlah Pertemuan dan Koordinasi yang dilakukan Forum	5 Orang	5 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Orang	-	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
			2 Jumlah Pertemuan dan Koordinasi yang dilakukan tim	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	-	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
			3 Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	-	-	-	1 Forum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Forum	-	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

			4	Jumlah Pertemuan dan Koordinasi yang dilakukan tim Terpadu Daerah Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	11 Kecamatan	-	11 Kecamatan	200,000,000	11 Kecamatan	200,000,000	11 Kecamatan	250,000,000	11 Kecamatan	250,000,000	11 Kecamatan	900,000,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			5	Jumlah pertemuan dan Koordinasi oleh Tim Kewaspadaan Dini Daerah	-	-	-	11 Kecamatan	-	11 Kecamatan	120,000,000	11 Kecamatan	130,000,000	11 Kecamatan	140,000,000	11 Kecamatan	140,000,000	11 Kecamatan	530,000,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			6	Jumlah pertemuan dan koordinasi oleh FKDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			7	Persentase hibah untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	-	-	-	-	-	1 Forum	200,000,000	1 Forum	250,000,000	-	-	-	-	1 Forum	450,000,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8	Jumlah pertemuan dan Koordinasi tentang Pemantauan Orang Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	1.	Jumlah Data Konflik Sosial	1 Tahun	1 Tahun	54,404,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2.	Jumlah pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi asing	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	5 Kecamatan	80,000,000	5 Kecamatan	100,000,000	5 Kecamatan	150,000,000	5 Kecamatan	150,000,000	5 Kecamatan	480,000,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			3.	Jumlah Data potensi Konflik Sosial di Kabupaten Bengkalis	-	-	-	-	-	11 Kecamatan	100,000,000	11 Kecamatan	120,000,000	11 Kecamatan	150,000,000	11 Kecamatan	150,000,000	11 Kecamatan	520,000,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			4.	Jumlah data masalah aktual dan aksi unjuk rasa	-	-	-	-	-	11 Kecamatan	120,000,000	11 Kecamatan	150,000,000	11 Kecamatan	170,000,000	11 Kecamatan	200,000,000	11 Kecamatan	640,000,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Koordinasi dan pertemuan anggota FORKOPIMDA		37 Orang	74,544,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 Orang	74,544,600	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			2	Jumlah pertemuan dan Koordinasi oleh FORKOPIMDA		-	-	23 Orang	50,000,000	23 Orang	170,000,000	23 Orang	200,000,000	23 Orang	200,000,000	23 Orang	200,000,000	23 Orang	820,000,000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan Bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, target kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Selanjutnya target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
2.	Persentase partisipasi politik masyarakat	71,75%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
3.	Jumlah Pengurus Organisasi Kemasyarakatan yang mendapat pembinaan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
4.	Persentase menurunnya kasus penyalahgunaan narkotika	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	72%	65%	60%	55%	50%	45%	40%	40%
2.	Jumlah penurunan penghuni tindak pidana narkoba Lapas Kelas II A Bengkulu	1085	900	850	800	750	700	650	650

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penghitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya penguatan kesatuan bangsa dan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bengkulu	Terpeliharanya penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan tahun n-1
		Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat datang ke TPS yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah Pemilih Terdaftar}} \times 100\%$

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dengan dukungan bersama-sama perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Akhirnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 2016 - 2021. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, Renstra ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis diverifikasi oleh Tim Validasi dan Verifikasi pada Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai program dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Pelaksanakan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman bagi segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis akan diimplementasikan secara konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan bersama jajarannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana

Strategis periode 2021-2026.

3. Evaluasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dilakukan sekurang- kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pengendalian dan evaluasi dilakukan pada tiap tahun pelaksanaan anggaran melalui evaluasi Rencana Kerja (Renja) per triwulan yang merupakan bagian integral dari pengendalian pencapaian sasaran serta indikator kinerja sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis.
5. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis diperlukan adanya perbaikan atau revisi sesuai kebijakan perencanaan dan ekonomi daerah maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun rencana dan pada kesempatan yang sama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. HERMANTO, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630310 198702 1 002